

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT 1995) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT 2007) memberikan pengaturan yang berbeda mengenai kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Secara teknis yuridis, UU PT 1995 menempatkan RUPS sebagai Organ Perseroan Terbatas tertinggi sedangkan UU PT 2007 menempatkan RUPS sebagai Organ Perseroan Terbatas yang sejajar dengan Organ Perseroan Terbatas lainnya. Akan tetapi, perubahan pengaturan kedudukan tersebut tidak diikuti dengan perubahan pengaturan mengenai kewenangan RUPS. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian hukum untuk mencari penjelasan sistematis mengenai perkembangan kedudukan dan kewenangan RUPS dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Penelitian hukum ini menghasilkan temuan bahwa frasa Organ Perseroan Terbatas yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Pasal 1 angka 3 UU PT 1995 seharusnya dibaca RUPS sebagai Organ Perseroan Terbatas yang sejajar dengan Organ Perseroan Terbatas lainnya. Hal ini sudah dilakukan oleh UU PT 2007 dengan memposisikan kedudukan RUPS sejajar dengan Organ Perseroan Terbatas lainnya. Selain itu tidak ditemukan perbedaan yang signifikan mengenai jenis kewenangan RUPS ketika diatur dalam UU PT 1995 dan setelah diatur dalam UU PT 2007, namun UU PT 2007 mengatur kewenangan RUPS sedemikian rupa untuk lebih mensejajarkan kedudukan Organ Perseroan Terbatas lainnya dengan RUPS.

Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham, Kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham, Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham.

ABSTRACT

Law Number 1 of 1995 concerning Limited Liability Companies and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies set a different rule about the position of General Meeting of Shareholders (GMS). As a legal concept, Law Number 1 of 1995 places GMS as the highest Company Organs, while Law Number 40 of 2007 places GMS as a Company Organs that has equal position with the other Company Organs. Nevertheless, the amendment of rule about the position of GMS is not followed by the amendment of rule about the authority of GMS. For this reason, researcher interested in a systematic explanation about the development of the position and the authority of GMS using statute approach, conceptual approach, and historical approach. This legal research finds phrase in Article 1 number 3 Law Number 1 of 1995, that states GMS is the Company Organ which have the highest authority, should be read GMS as a Company Organ that has equal position with the other Company Organs. Therefore, Law Number 40 of 2007 amends that inconsistency by stating that GMS has equal position with the other Company Organs. Furthermore, researcher found that there is no difference in GMS' scope of authority between Law Number 1 of 1995 and Law Number 40 of 2007, but Law Number 40 of 2007 affirms the equal position between Company Organs by setting more detailed rules.

Keywords: *Limited Liability Companies, General Meeting of Shareholders, The Position of General Meeting of Shareholders, The Authority of General Meeting of Shareholders.*